

**PENGUATAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOOR SANDY MASRINANDA

NPP. 32.0766

Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0766@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP, MH

ABSTRACT

(Problem Statement/Background (GAP): *The performance of the Community Protection Unit (Satlinmas) in Pelaihari, Tanah Laut is critically hindered by various challenges, including inadequate funding, limited human resources, and a lack of proper facilities and equipment. These deficiencies are exacerbated by a significant gap in community awareness and involvement in supporting public order and tranquility. As a result, Satlinmas struggles to fulfill its duties effectively, which compromises the safety and stability of the community. This situation highlights an urgent need for a robust policy framework and strategic initiatives to enhance the capacity of Satlinmas, enabling it to better address public security threats and contribute to maintaining law and order.* **Purpose:** *This study aims to analyze the implementation of capacity building for the Satlinmas in Pelaihari and its role in maintaining public order and tranquility (Trantibum) in the area.* **Method:** *This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing case study methods. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, with a focus on key informants from various local government units and Satlinmas personnel. The analysis is grounded in Merilee S. Grindle's capacity building theory, which examines three dimensions: human resource development, organizational strengthening, and institutional reform.* **Result:** *The findings reveal that the capacity building efforts for Satlinmas in Pelaihari have not been fully effective. Key obstacles include insufficient funding, limited training opportunities, and a lack of essential equipment for Satlinmas members. Additionally, there is low public awareness of the Satlinmas' role in maintaining order. However, local authorities have initiated several steps to address these challenges, including periodic training sessions, the establishment of local regulations, and improved coordination between agencies.* **Conclusion:** *While the Satlinmas in Pelaihari has contributed to maintaining public order, its effectiveness is constrained by various challenges, including limited resources, inadequate training, and poor public awareness of its role. A more structured approach to capacity building is essential for the unit to function optimally and to contribute significantly to public safety in the community.* **Keywords:** *Capacity Building, Community Protection Unit (Satlinmas), Local Government, Public Order, Pelaihari, Tanah Laut, Trantibum*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Pelaihari, Tanah Laut sangat terbatas akibat berbagai tantangan, termasuk anggaran yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya

fasilitas dan peralatan yang memadai. Masalah ini semakin diperburuk oleh rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban umum. Akibatnya, Satlinmas kesulitan menjalankan tugasnya secara efektif, yang berpotensi mengancam stabilitas dan keselamatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan kebijakan yang lebih kuat dan inisiatif strategis untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas, guna lebih efektif menangani ancaman keamanan dan mendukung penegakan hukum di tingkat desa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penguatan kapasitas Satlinmas di Pelaihari dan perannya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) di daerah tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan fokus pada informan kunci dari berbagai unit pemerintah daerah dan anggota Satlinmas. Analisis didasarkan pada teori penguatan kapasitas Merilee S. Grindle, yang mencakup tiga dimensi: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan kapasitas Satlinmas di Pelaihari belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama termasuk anggaran yang terbatas, kesempatan pelatihan yang minim, dan kurangnya peralatan yang memadai untuk anggota Satlinmas. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban masih rendah. Namun, pihak berwenang setempat telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pelatihan berkala, penyusunan peraturan daerah, dan peningkatan koordinasi antar lembaga. **Kesimpulan:** Meskipun Satlinmas di Pelaihari telah berkontribusi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, pelatihan yang tidak memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perannya.

Kata kunci: Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah, Pelaihari, Satlinmas, Tanah Laut

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan dalam era modernisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi (Prabowo Hadi, 2022). Ketertiban umum merupakan kondisi yang tercipta ketika semua warga masyarakat menjaga keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari (Rusfiana, 2021). Ketertiban umum menjadi sangat penting dalam masyarakat karena mencerminkan adanya kesadaran kolektif dan tanggung jawab masing-masing individu dalam menjaga tatanan sosial. (Pramono & Prianggodo, 2023) Gangguan ketertiban dan ketentraman umum telah menjadi fenomena yang sudah melekat sejak lama di masyarakat umum. Hal ini dikarenakan beberapa pihak masyarakat kurang puas dengan peraturan yang sudah ada maupun faktor-faktor permasalahan pribadi (Winarko & Mursyidah, 2022) Hal ini disadari dengan segala keterbatasan polisi, tanpa peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi, Polisi akan sulit dalam mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat, perlunya mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya suatu kejahatan, rasa aman dan nyaman di masyarakat (Ramadani & Rohana, 2024). Kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Pelaihari, Tanah Laut menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya program pelatihan yang memadai. Kurang optimalnya peran linmas ini akan berdampak pada

kondisi keamanan dan ketentraman masyarakat.(Nurhayunda & Reviandani, 2025) Tantangan-tantangan ini menghambat kemampuan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat secara efektif. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya keamanan publik. Mengingat terbatasnya fasilitas dan tingginya permintaan pelayanan, sangat diperlukan penguatan kapasitas Satlinmas untuk dapat mengatasi ancaman keamanan publik dengan lebih baik.

Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, unit ini menghadapi berbagai hambatan seperti alokasi anggaran yang terbatas, pelatihan yang minim, dan kurangnya peralatan yang memadai. Hal ini membatasi kemampuan Satlinmas dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Penilaian terhadap kondisi saat ini mengungkapkan bahwa ada celah dalam efisiensi operasional Satlinmas dan bahwa penguatan kapasitas unit ini sangat penting untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan keadaan darurat, pencegahan kejahatan, dan menjaga keamanan publik. Peningkatan organisasi masyarakat harus melibatkan peningkatan rekrutmen yang lebih selektif dan penyediaan pelatihan yang lebih intensif bagi anggotanya (Black & Heap, 2025)

Satlinmas di Pelaihari menghadapi sejumlah kasus ketertiban yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Sebagai contoh, kasus kerusuhan sosial yang melibatkan perkelahian dan konflik antarwarga menunjukkan peningkatan, dengan jumlah kasus naik dari 20 pada tahun 2022 menjadi 25 pada tahun 2023, yang mencerminkan peningkatan sebesar 25%. Selain itu, pengamanan acara massa juga mengalami peningkatan, dari 15 acara pada tahun 2022 menjadi 18 acara pada tahun 2023, dengan peningkatan sebesar 20%.

Tidak hanya itu, pengawasan lingkungan, seperti pengendalian kerumunan dan patroli, yang menjadi tugas Satlinmas juga menunjukkan peningkatan. Jumlah kasus pengawasan meningkat dari 30 kasus pada tahun 2022 menjadi 35 pada tahun 2023, dengan persentase perubahan sebesar 16,7%. Sementara itu, kasus gangguan ketertiban umum, seperti perusakan dan pencurian, meningkat sedikit, dengan jumlah kasus naik dari 12 pada tahun 2022 menjadi 14 pada tahun 2023, atau sekitar 16,7%.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus yang Ditangani oleh Satlinmas di Pelaihari, 2022-2023

| Jenis Kasus | 2022 | 2023 | Persentase Perubahan (%) |
|--------------------------------|------|------|--------------------------|
| Kasus Kerusuhan Sosial | 20 | 25 | +25% |
| Pengamanan Acara Massa | 15 | 18 | +20% |
| Kasus Pengawasan Lingkungan | 30 | 35 | +16.7% |
| Kasus Gangguan Ketertiban Umum | 12 | 14 | +16.7% |

Sumber: Pemerintah Daerah Tanah Laut, 2023

Tabel di atas menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh Satlinmas di Pelaihari, menyoroti area-area utama yang membutuhkan perbaikan, seperti sumber daya manusia, pelatihan, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Meskipun ada beberapa peningkatan, data ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih terfokus untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memperkuat kapasitas unit tersebut.

Di Pelaihari, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja Satlinmas, kesadaran masyarakat masih rendah. Partisipasi masyarakat dan dukungan kolektif

sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Satlinmas dalam menjaga ketertiban. Namun, pemberdayaan unit perlindungan masyarakat sering kali dihadapkan pada tantangan seperti terbatasnya anggaran, kurangnya fasilitas, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung operasional unit ini. (Kirk *et al*, 2024) Komunitas yang lebih sadar akan fungsi Satlinmas dan terlibat aktif dalam kegiatannya cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman keamanan. Kolaborasi antara unit perlindungan masyarakat dan masyarakat lebih penting daripada sekadar peningkatan fasilitas fisik. (Hao *et al*, 2025) Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Satlinmas, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas unit ini dan memastikan hasil yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas saat ini dari Satlinmas di Pelabuhan dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang membatasi efektivitasnya. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas unit ini guna memastikan keselamatan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu kesenjangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan pengelolaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum di Pelabuhan. Meskipun Satlinmas memiliki peran vital dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, data menunjukkan bahwa kinerja Satlinmas dalam menangani berbagai kasus ketertiban umum, seperti kerusuhan sosial dan gangguan ketertiban lainnya, masih belum optimal. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas Satlinmas belum sepenuhnya berhasil dalam mengoptimalkan potensi yang ada.

Selain itu, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas, seperti peningkatan pelatihan dan pengadaan peralatan, sistem koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan ketertiban umum masih belum berjalan dengan efektif. Banyaknya kasus yang harus ditangani Satlinmas menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini masih terfragmentasi, tidak efisien, dan sering kali menimbulkan kendala dalam penanganan gangguan ketertiban, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas dan fasilitas yang kurang memadai.

Kesenjangan lainnya terletak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya Satlinmas. Meskipun pemerintah daerah sudah menyediakan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan Satlinmas, seperti sosialisasi tentang ketertiban umum, banyak warga yang masih kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran Satlinmas, dan terbatasnya sarana komunikasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, meskipun peraturan dan kebijakan terkait ketertiban umum sudah ada dan terus diperbarui, terdapat kesenjangan antara implementasi kebijakan dengan kenyataan di lapangan. Tidak semua proses pengawasan dan penanganan ketertiban dapat dilakukan secara terintegrasi dan efisien, dengan banyaknya kasus yang harus kembali diproses melalui instansi terkait lainnya untuk verifikasi lebih lanjut, yang tentunya mengurangi efektivitas tindakan cepat yang diperlukan dalam menjaga ketertiban.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai Satlinmas lebih banyak menyoroti

keberhasilan pengelolaan ketertiban umum di daerah dengan infrastruktur yang lebih baik dan sumber daya yang lebih memadai, seperti di kota-kota besar. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan (research gap) mengenai bagaimana Satlinmas dapat beroperasi secara efektif di daerah-daerah dengan tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya, seperti di Pelaihari, yang menghadapi hambatan teknis, struktural, dan sosial dalam meningkatkan kualitas pengelolaan ketertiban umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian oleh Noubert, Ivandel Pade Liwun (2020) dalam Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Membantu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata mengungkapkan bahwa meskipun upaya peningkatan kapasitas sudah dilakukan, Satlinmas di Kabupaten Lembata menghadapi kendala besar seperti kurangnya sumber daya manusia, fasilitas yang tidak memadai, serta terbatasnya anggaran untuk pengembangan kapasitas. Hal ini menyebabkan efektivitas Satlinmas dalam menjalankan tugasnya masih kurang optimal. Penelitian ini menyarankan peningkatan standar perekrutan dan penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung operasional Satlinmas

Audey & Ariusni (2019) dalam penelitiannya menyoroti masalah utama dalam pemberdayaan Satlinmas yang disebabkan oleh anggaran terbatas, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan Satlinmas. Penelitian ini mengusulkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran dan menyediakan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan Satlinmas, serta memperbaiki koordinasi antara Satlinmas dan masyarakat untuk mencapai ketentraman dan ketertiban yang lebih baik di daerah tersebut

Valentino Rio (2023) dalam Pemberdayaan Satlinmas dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah meneliti pemberdayaan Satlinmas di wilayah tersebut dan menemukan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya fasilitas serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Meskipun beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas telah mengaktifkan Satlinmas, banyak daerah yang masih kesulitan dalam melaksanakan tugas Satlinmas karena kekurangan sarana dan prasarana, serta minimnya anggaran operasional. Penelitian ini menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah terhadap fasilitas yang dibutuhkan oleh Satlinmas

Penelitian Hadad Mauluddin (2022) yang berjudul Pemberdayaan Satlinmas dalam Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya pemberdayaan melalui pelatihan dan sosialisasi, masalah anggaran tetap menjadi penghambat utama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas melalui pelatihan dan sosialisasi, keterbatasan anggaran menghambat keberhasilan pemberdayaan yang optimal. Diperlukan peningkatan anggaran dan fasilitas untuk memastikan bahwa Satlinmas dapat menjalankan tugasnya secara efektif

Pramono & Suranto (2022) dalam Pemberdayaan Satlinmas dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta mengidentifikasi masalah utama dalam pemberdayaan Satlinmas di wilayahnya,

yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional Satlinmas. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan fasilitas yang diperlukan, seperti kendaraan untuk patroli, dan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk meningkatkan efektivitas Satlinmas dalam menjaga ketertiban di masyarakat

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan Satlinmas memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan anggaran. Kendala yang dihadapi Satlinmas, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya fasilitas, dan minimnya dukungan anggaran, masih menjadi tantangan utama dalam upaya menjaga ketertiban dan ketentraman umum di berbagai daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam kajian pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan pendekatan yang lebih terfokus pada peran sosial dan pemberdayaan komunitas lokal, daripada hanya sekedar peningkatan kapasitas teknis atau infrastruktur. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus utamanya untuk menggali dinamika sosial, tantangan yang dihadapi oleh Satlinmas dalam mengoptimalkan peran sosial mereka dalam menjaga ketertiban, dan pendekatan partisipatif yang mengedepankan peran masyarakat dalam mendukung Satlinmas di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Meskipun banyak penelitian terdahulu telah membahas pemberdayaan Satlinmas dengan pendekatan yang serupa, penelitian ini memberikan keberagaman metodologi dan fokus, yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Salah satu keunikan utama adalah penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan wawancara mendalam dengan aktor kunci di tingkat lokal dan partisipasi masyarakat sebagai elemen sentral dalam pemberdayaan Satlinmas. Fokus ini tidak hanya sekedar menilai kapasitas fisik dan anggaran, tetapi juga menilai kemampuan beradaptasi dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan Satlinmas.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nugroho & Supardal (2022) dalam Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Membantu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, lebih berfokus pada masalah kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang tidak memadai dalam meningkatkan kapasitas teknis Satlinmas. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada penguatan kapasitas sosial dan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain, penelitian ini memperkenalkan peran kolaboratif antara Satlinmas dan masyarakat, yang menjadi kebaruan dalam pembahasan mitigasi ketertiban umum

Audey & Ariusni (2019) menekankan kendala anggaran terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat, namun lebih berfokus pada penerapan kebijakan pemerintah untuk mendukung operasional Satlinmas. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini menggabungkan kebijakan pemerintah dengan peran aktif masyarakat yang selama ini jarang menjadi fokus utama. Penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih holistik, dengan melihat peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan Satlinmas, bukan hanya faktor kebijakan pemerintah atau anggaran semata

Penelitian VALENTINO RIO (2023) dalam Pemberdayaan Satlinmas dalam Menjaga

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menemukan bahwa terbatasnya fasilitas menjadi hambatan utama. Namun, penelitian ini lebih banyak menekankan peningkatan fasilitas fisik dan operasional Satlinmas, sementara penelitian ini menyoroti pentingnya solidaritas sosial, pengetahuan risiko, dan kemampuan beradaptasi dari anggota Satlinmas dan masyarakat sebagai bagian dari strategi mitigasi ketertiban umum. Penelitian ini lebih menekankan aspek sosial dalam pemberdayaan Satlinmas yang jarang dibahas dalam penelitian terdahulu

Mauluddin Akbhar (2022) dalam Pemberdayaan Satlinmas dalam Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung memfokuskan pada pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian kami, karena metode yang digunakan lebih terpusat pada upaya teknis dalam pelatihan dan perbaikan fasilitas, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan pendekatan sosial dan menilai dampaknya terhadap ketentraman dan ketertiban yang lebih luas, dengan peran serta masyarakat sebagai faktor yang sangat mempengaruhi hasil mitigasi kebakaran

Joko Pramono (2022) dalam Pemberdayaan Satlinmas dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta lebih menekankan pada kekurangan sarana dan prasarana yang menghambat operasional Satlinmas, namun penelitian ini lebih berfokus pada upaya teknis untuk meningkatkan fasilitas dan kendaraan operasional. Penelitian ini menambahkan kebaruan dengan menggali peran masyarakat dalam memperkuat ketertiban umum dan mengusulkan penguatan kapasitas sosial dari masyarakat untuk mendukung Satlinmas dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kebaruan ilmiah dengan menggabungkan aspek sosial dan teknis dalam pemberdayaan Satlinmas, dengan fokus pada kolaborasi antara Satlinmas dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ketertiban umum. Solidaritas sosial, pengetahuan risiko, dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan Satlinmas di Kecamatan Pelaihari, yang menjadi kontribusi unik terhadap literatur yang ada mengenai pemberdayaan Satlinmas di Indonesia.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penguatan kapasitas Satlinmas di Pelaihari dan perannya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) di daerah tersebut.

II. METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, serta upaya-upaya yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi Satlinmas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi faktual yang ada, kebijakan yang diterapkan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ketertiban umum di Kecamatan Pelaihari.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan yang

ada secara komprehensif, termasuk tantangan yang dihadapi oleh Satlinmas dan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya pemberdayaan Satlinmas. Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Menurut Simangunsong (2017:190), penelitian deskriptif kualitatif dapat menyesuaikan dengan dinamika lapangan, sehingga peneliti dapat mengakomodasi perubahan informasi yang terjadi selama proses pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik ini dipilih untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai pemberdayaan Satlinmas dan implementasinya di Kecamatan Pelaihari. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, Camat Pelaihari, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari, serta tokoh masyarakat dan anggota Satlinmas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan pemberdayaan Satlinmas. Mereka dipilih karena mereka memiliki informasi yang sangat relevan tentang kebijakan, implementasi, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ketertiban umum di Kecamatan Pelaihari.

Penelitian ini dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, Kantor Kecamatan Pelaihari, serta beberapa Kelurahan dan Desa di Kecamatan Pelaihari yang sering terlibat dalam kegiatan Satlinmas.. Dengan mengunjungi lokasi ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih representatif mengenai kondisi nyata di lapangan serta tantangan yang dihadapi oleh Satlinmas dalam menjalankan tugas mereka. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan, dimulai pada tanggal 6 – 25 Januari 2025, memberikan cukup waktu bagi peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid dan menyeluruh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan dari pejabat terkait di Dinas Ketenagakerjaan dan Perlindungan Masyarakat (Ketenagakerjaan dan Satpol PP), tokoh masyarakat, serta anggota Satlinmas mengenai kebijakan pemberdayaan Satlinmas, kesiapsiagaan masyarakat, dan langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan kapasitas Satlinmas untuk menjaga ketertiban umum. Observasi dilakukan untuk memantau implementasi kebijakan pemberdayaan Satlinmas di lapangan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya mitigasi kebakaran dan pengelolaan ketertiban umum. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait kebijakan, laporan tahunan, dan temuan-temuan terkait Satlinmas dari pihak terkait.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut, tokoh masyarakat yang aktif dalam program pemberdayaan Satlinmas, serta warga yang tinggal di kawasan yang memiliki Satlinmas yang aktif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pemberdayaan Satlinmas dan pelaksanaan ketertiban umum. Teknik ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada peran

aktor kunci dalam pemberdayaan Satlinmas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait kebijakan dan implementasi program di tingkat daerah. Sedangkan informan pendukung dipilih menggunakan teknik Snowball Sampling, yaitu melalui rekomendasi dari informan utama untuk menggali pandangan masyarakat atau pihak terkait yang memiliki informasi relevan mengenai pemberdayaan Satlinmas di kawasan tersebut.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pemberdayaan Satlinmas, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pelaihari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN PELAIHARI

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan antara 6 Januari hingga 25 Januari 2025, peneliti mengumpulkan informasi terkait implementasi kebijakan dalam penguatan kapasitas Satlinmas di Kecamatan Pelaihari. Data yang diperoleh menunjukkan tantangan dalam pelatihan anggota, proses rekrutmen, serta kondisi kerja yang mempengaruhi efektivitas Satlinmas dalam menjalankan tugasnya. Peneliti menggunakan teori Penguatan Kapasitas yang memiliki tiga dimensi dari Grindle (2012) untuk membahas penguatan kapasitas oleh satuan tugas perlindungan masyarakat di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Dimensi tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.

3.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu dimensi kunci dalam penguatan kapasitas Satlinmas, karena keberhasilan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sangat bergantung pada keterampilan dan pengetahuan anggota Satlinmas. Dimensi pengembangan SDM ini melibatkan pelatihan, rekrutmen, praktek langsung, dan kondisi kerja, yang secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas oleh Satlinmas di Kecamatan Pelaihari.

A. Pelatihan

Pelatihan merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas anggota Satlinmas. Dalam hal ini, pelatihan bertujuan untuk memperkuat kapasitas anggota Satlinmas agar dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada, terutama dalam hal menjaga ketertiban dan menangani gangguan ketertiban umum.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanah Laut, Akhmad Syahrui, S.E., pada 13 Januari 2025, pelatihan yang dilakukan untuk anggota Satlinmas di Kecamatan Pelaihari masih terbatas. Pelatihan yang dilaksanakan hanya dilakukan setahun sekali atau dua kali, dan

hanya diikuti oleh perwakilan dari masing-masing desa atau kelurahan. Hal ini menyebabkan banyak anggota Satlinmas yang belum mendapat pelatihan secara menyeluruh.

“Pelatihan Satlinmas adalah tanggung jawab masing-masing Desa/Kelurahan yang diselenggarakan oleh mereka. Satpol PP sebenarnya bisa melaksanakan pelatihan rutin untuk seluruh anggota Satlinmas, namun permasalahannya pada anggaran yang diperlukan cukup besar. Untuk sekarang pelatihan yang bisa dilaksanakan hanya sekali atau dua kali dalam setahun karena sudah dianggarkan, tetapi terbatas hanya perwakilan saja dari tiap desa/kelurahan sehingga tidak mencakup seluruh anggota.” Akhmad Syahrui, S.E., Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Tanah Laut

Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam melaksanakan pelatihan secara rutin dan menyeluruh bagi anggota Satlinmas. Pelatihan yang lebih terjadwal dan merata untuk semua anggota Satlinmas di tingkat desa dan kelurahan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas.

B. Rekrutmen

Rekrutmen anggota Satlinmas di Kecamatan Pelaihari umumnya dilakukan melalui penunjukan oleh Kepala Desa atau Lurah, bukan seleksi terbuka berdasarkan kualifikasi tertentu. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bumi Jaya, Mulyono, S.T., pada 17 Januari 2025, beliau menyampaikan bahwa proses rekrutmen hanya dilakukan melalui penunjukan Kepala Dusun dan tidak ada seleksi resmi yang dilakukan.

“Penerimaan anggota satlinmas di Desa ini dilakukan hanya melalui penunjukan oleh Kepala Dusun. Jika dilakukan seleksi seperti polisi dan tentara, tidak ada yang mendaftar, penunjukan dari Kepala Dusun juga yang dianggap memenuhi kriteria dan terutama mau mengikuti kegiatan Satlinmas.” Mulyono, S.T., Kepala Desa Bumi Jaya

Rekrutmen yang dilakukan secara informal ini berpotensi membatasi kualitas anggota Satlinmas, karena anggota yang terpilih mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan tugas mereka. Oleh karena itu, proses rekrutmen yang lebih terstruktur dan berbasis kriteria yang jelas perlu diperkenalkan untuk memastikan anggota Satlinmas yang terpilih memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

C. Praktek Langsung

Praktek langsung menjadi salah satu aspek yang penting dalam pengembangan SDM, karena dapat memberikan pengalaman nyata dalam menangani situasi ketertiban umum. Dalam wawancara dengan Lurah Sarang Halang, M. Buyung Ramadhan, S.STP., pada 19 Januari 2025, beliau menjelaskan bahwa kegiatan praktek langsung bagi Satlinmas di desa mereka lebih sering dilakukan dalam bentuk pengamanan acara masyarakat, seperti hajatan dan kegiatan keramaian lainnya.

“Kalau di Kelurahan Sarang Halang ini contoh praktek langsungnya yaitu melakukan pengamanan untuk kegiatan hajatan dan juga acara lainnya yang mengundang keramaian. Satlinmas mengambil peranan penting sebagai garda utama untuk melakukan pencegahan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum.” M. Buyung Ramadhan, S.STP., Lurah Sarang Halang

Meskipun kegiatan ini memberikan pengalaman bagi anggota Satlinmas, namun praktek langsung masih terbatas pada pengamanan acara dan tidak mencakup latihan atau penanganan

masalah ketertiban yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting bagi Satlinmas untuk memperluas cakupan praktek langsung yang melibatkan berbagai situasi yang lebih bervariasi dan kompleks, agar anggota Satlinmas dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai ancaman ketertiban umum yang lebih serius.

D. Kondisi Kerja

Kondisi kerja juga memainkan peran penting dalam pengembangan kapasitas Satlinmas. Berdasarkan wawancara dengan anggota Satlinmas Kelurahan Pelaihari, Syahrudin, pada 18 Januari 2025, diketahui bahwa banyak anggota Satlinmas yang bekerja di luar jam tugas mereka, seperti petani atau pekerja bangunan. Ini menyebabkan mereka hanya dapat bertugas pada malam hari untuk ronda dan pengamanan, sementara pada siang hari mereka menjalani pekerjaan lain.

“Satlinmas di Kelurahan Pelaihari hanya beberapa yang rajin piket, karena mereka (anggota yang lain) punya pekerjaan lain kaya petani, ternak, dan ada yang jadi kuli bangunan.” Syahrudin, Anggota Satlinmas Kelurahan Pelaihari

Kondisi kerja yang demikian mengurangi partisipasi penuh anggota Satlinmas dalam menjaga ketertiban sepanjang waktu, karena mereka tidak dapat sepenuhnya mengalokasikan waktu untuk tugas Satlinmas, terutama saat ada kegiatan masyarakat yang membutuhkan pengawasan lebih ketat.

3.2. Penguatan Organisasi

Tujuan dari dimensi penguatan organisasi adalah untuk meningkatkan kapasitas manajerial, sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, dan struktur manajerial dalam organisasi Satlinmas.

A. Sistem Insentif

Sistem insentif merupakan faktor penting dalam memotivasi anggota Satlinmas untuk bekerja lebih optimal. Namun, berdasarkan wawancara dengan Lurah Pelaihari, M. Hidayatullah, S.STP., pada 18 Januari 2025, Satlinmas di desa tersebut belum memiliki sistem insentif yang tetap. Insentif yang ada hanya diberikan secara situasional, seperti upah atau uang lelah saat terlibat dalam kegiatan pengamanan. Hal ini menunjukkan kurangnya dukungan untuk meningkatkan motivasi anggota Satlinmas.

B. Perlengkapan Personil

Perlengkapan personil, seperti seragam, alat komunikasi, dan perlengkapan lainnya, sangat penting untuk mendukung kegiatan Satlinmas. Berdasarkan wawancara dengan Camat Pelaihari, Agus Setiyo, S.STP., MM., pada 15 Januari 2025, diketahui bahwa Kecamatan Pelaihari belum memiliki anggaran khusus untuk pengadaan perlengkapan operasional Satlinmas. Meskipun beberapa desa telah menyediakan perlengkapan dasar, seperti seragam dan alat komunikasi, ketersediaannya masih terbatas dan tidak merata.

C. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat sangat dibutuhkan dalam organisasi Satlinmas. Wawancara dengan Kasatgas Linmas Tanah Laut, Muh. Kusri, S.P pada 13 Januari 2025, mengungkapkan bahwa meskipun ada sosialisasi mengenai struktur organisasi, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tugas dan peran anggota Satlinmas di beberapa desa. Pemimpin Satlinmas di desa sering kali kesulitan dalam memberikan arahan yang jelas, terutama karena masalah mutasi pegawai dan perubahan tugas yang sering terjadi.

3.3. Reformasi Kelembagaan

Disposisi Reformasi kelembagaan adalah proses perubahan yang sistematis dan terencana pada struktur, mekanisme kerja, serta kebijakan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adaptasi terhadap tantangan yang ada. Dalam konteks Satlinmas di Kecamatan Pelaihari, reformasi kelembagaan melibatkan perubahan kebijakan dan regulasi, serta penataan kembali struktur birokrasi agar lebih efisien dalam mendukung tugas Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum.

A. Perubahan Kebijakan dan Regulasi

Perubahan kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam organisasi Satlinmas di Kecamatan Pelaihari sangat penting untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan lebih efektif. Berdasarkan wawancara dengan Kasatgas Linmas Tanah Laut, Muh. Kusri, S.P., pada 13 Januari 2025, beliau menjelaskan bahwa meskipun ada regulasi baru terkait tugas Satlinmas, implementasi di lapangan masih belum berjalan dengan optimal.

"Regulasi Satlinmas sudah dirubah sejak Permendagri No. 26 tahun 2020 ditetapkan, kami telah mensosialisasikan dan mencoba melaksanakan penyesuaian. Tapi karena Satlinmas ini susah untuk disesuaikan penuh dengan peraturan tersebut, terutama mengenai anggaran untuk Satlinmas ini. Belum ada tindak lanjut dari Kepala Daerah mengenai perubahan kebijakan melalui Peraturan Bupati dan sebagainya." — Muh. Kusri, S.P., Kasatgas Linmas Tanah Laut

Meskipun regulasi telah diperbarui, pelaksanaannya masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti anggaran yang terbatas dan kesulitan dalam penyesuaian kebijakan di tingkat desa atau kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih terintegrasi, serta dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dijalankan dengan lebih efektif.

B. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik sangat penting dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Tanah Laut, Akhmad Syahruiji, S.E., pada 13 Januari 2025, beliau mengungkapkan bahwa meskipun struktur organisasi Satlinmas di Kecamatan Pelaihari sudah cukup jelas, masih terdapat beberapa kendala dalam pembagian peran dan tugas yang menghambat efektivitas kerja.

"Kami Satpol PP bidang Linmas sudah melaksanakan sosialisasi bagaimana Satlinmas yang sesuai dengan Permendagri No 26 tahun 2020. Namun, kendala di lapangan susah untuk diterapkan SOTK yang baru, banyak kelurahan dan desa yang belum melaksanakan sesuai dengan peraturan yang baru sehingga memang kendala di lapangan seperti demikian." Akhmad Syahruiji, S.E., Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Tanah Laut

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bumi Jaya, Mulyono, S.T., pada 17 Januari 2025, struktur organisasi Satlinmas di beberapa desa masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pembagian peran dan tugas yang jelas di antara anggota Satlinmas.

"Desa kami sudah menerapkan sesuai peraturan terkait struktur organisasi Satlinmas, sudah ada komandan regunya dan regu dapur umum juga untuk ketua penanggung jawabnya saya sendiri. Namun, untuk keahlian khususnya belum, jadi kami hanya menerapkan sesuai dengan peraturan dulu kemudian menyusul untuk mengadakan pelatihan." Mulyono, S.T.,

Kepala Desa Bumi Jaya

Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam implementasi struktur birokrasi yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan jelas. Oleh karena itu, penataan ulang struktur organisasi yang lebih fleksibel dan berbasis pada kompetensi anggota Satlinmas sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi.

C. Fragmentasi dalam Birokrasi

Fragmentasi dalam birokrasi dapat menghambat koordinasi antar bagian dalam organisasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, koordinasi antar instansi yang terlibat dalam tugas Satlinmas masih perlu diperbaiki. Berdasarkan wawancara dengan Camat Pelaihari, Agus Setiyo, S.STP., MM., pada 15 Januari 2025, beliau menyatakan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan koordinasi, namun fragmentasi dalam birokrasi masih menjadi masalah yang perlu diatasi.

"Kami terus berupaya menjaga efektivitas komunikasi sebagai salah satu bentuk pembinaan dan koordinasi. Kami juga terbuka terhadap masukan dan inovasi yang dapat meningkatkan sistem komunikasi ini ke depannya, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi yang lebih terintegrasi." Agus Setiyo, S.STP., MM., Camat Pelaihari

Dengan fragmentasi yang ada, banyak proses administrasi dan pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama, sehingga menurunkan efisiensi operasional Satlinmas dalam menangani gangguan ketertiban. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar instansi dan pengoptimalan sistem manajerial dalam Satlinmas di Kecamatan Pelaihari perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menjaga ketertiban umum.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan Satlinmas di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara Satlinmas dan masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan dalam menjaga ketertiban umum. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Nugroho & Supardal (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran terbatas menyebabkan efektivitas Satlinmas di Kabupaten Lembata kurang optimal. Penelitian ini menerima temuan tersebut dan menegaskan bahwa masalah anggaran dan keterbatasan fasilitas menjadi kendala utama dalam pemberdayaan Satlinmas di Kecamatan Pelaihari, yang juga menghambat peningkatan kapasitas operasional mereka

Penelitian Audey & Ariusni (2019) juga mengidentifikasi partisipasi masyarakat sebagai salah satu masalah utama. Penelitian ini menerima temuan tersebut, yang juga tercermin dalam penelitian ini, yang menyoroti bahwa kolaborasi antara Satlinmas dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung tugas Satlinmas, yang selama ini sering terabaikan dalam penelitian terdahulu

Namun, terdapat beberapa temuan terdahulu yang ditolak oleh penelitian ini. Penelitian Rio VALENTINO, RIO (2023) mengenai *Pemberdayaan Satlinmas di Kabupaten Kapuas* lebih menekankan peningkatan fasilitas fisik dan teknologi operasional sebagai kunci keberhasilan Satlinmas. Meskipun hal ini memang penting, penelitian ini menolak anggapan bahwa fasilitas fisik adalah satu-satunya solusi. Sebaliknya, penelitian ini menyoroti bahwa partisipasi aktif

masyarakat dan pengetahuan risiko yang mereka miliki dalam menghadapi kebakaran dan bencana lain, adalah elemen yang lebih mendasar dalam memperkuat kapasitas Satlinmas. Penelitian ini menemukan bahwa solidaritas sosial dan kolaborasi komunitas memiliki dampak yang lebih besar daripada hanya mengandalkan upaya teknis atau fasilitas semata

Demikian pula, temuan Hadad Mauluddin (2022) yang menekankan pentingnya pelatihan teknis bagi anggota Satlinmas di Kabupaten Bandung lebih banyak berfokus pada peningkatan keterampilan operasional. Penelitian ini menolak temuan tersebut karena meskipun pelatihan memang diperlukan, partisipasi masyarakat dan kolaborasi sosial terbukti lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan Satlinmas tidak hanya bergantung pada pelatihan teknis, tetapi juga pada bagaimana masyarakat secara aktif mendukung dan terlibat dalam tugas Satlinmas

Secara keseluruhan, meskipun banyak temuan dalam penelitian ini yang sejalan dengan penelitian terdahulu, penekanan pada peran sosial masyarakat dalam pemberdayaan Satlinmas dan solidaritas sosial sebagai faktor utama yang mempengaruhi ketertiban umum di Kecamatan Pelaihari menjadi temuan yang lebih mendalam dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas fisik dan anggaran perlu ditingkatkan, kolaborasi aktif masyarakat adalah faktor kunci dalam memperkuat kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi pemberdayaan Satlinmas di Kecamatan Pelaihari menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan ketertiban umum, meskipun tantangan besar masih ada. Satlinmas berhasil berperan dalam menjaga ketertiban dan membantu penanganan situasi darurat. Namun, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas yang mendukung operasional Satlinmas. Hal ini menyebabkan efektivitas tugas Satlinmas terkendala, terutama dalam menghadapi permasalahan ketertiban di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kecamatan Pelaihari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan Satlinmas di Kecamatan Pelaihari antara lain pelatihan berkelanjutan untuk anggota Satlinmas, koordinasi antar instansi pemerintah, serta dukungan masyarakat. Meskipun pelatihan telah dilakukan, masih ada beberapa anggota Satlinmas yang kesulitan dalam mengoperasikan perangkat dan sistem yang ada, terutama yang terkait dengan teknologi informasi untuk manajemen tugas dan pemantauan kegiatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tugas Satlinmas juga menjadi faktor yang menentukan dalam menciptakan ketertiban yang lebih baik.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan pemberdayaan Satlinmas melalui pelatihan, peningkatan anggaran, dan sosialisasi telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran dan kurangnya fasilitas pendukung yang menyebabkan Satlinmas kesulitan dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. Peningkatan pelatihan berkelanjutan untuk anggota Satlinmas, peningkatan sarana dan prasarana, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada

masyarakat sangat diperlukan agar pemberdayaan Satlinmas dapat diterapkan secara lebih efektif dan optimal di masa depan.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan ruang lingkup, yang hanya terfokus pada pemberdayaan Satlinmas di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya data mengenai perbandingan antara pemberdayaan Satlinmas di daerah lain yang mungkin memiliki kondisi lebih baik dalam hal anggaran dan fasilitas, yang dapat memberikan perspektif lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah dengan kondisi serupa.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work) Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengevaluasi pemberdayaan Satlinmas di daerah lain yang memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, khususnya di daerah dengan akses anggaran dan fasilitas yang lebih baik. Penelitian komparatif yang melibatkan beberapa daerah di Indonesia dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan Satlinmas dan pengelolaan ketertiban umum di berbagai daerah. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga bisa mengeksplorasi pengembangan sistem manajemen Satlinmas yang lebih efisien, serta penguatan kapasitas SDM Satlinmas untuk mendukung pengelolaan ketertiban yang lebih efektif di masa mendatang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan izin, dukungan, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk materi, waktu, maupun pemikiran yang sangat berguna untuk penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Audey, R. P., & Ariusni, A. (2019). PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6293>
- Black, A., & Heap, V. (2025). Community Protection Warnings and the practices of the preventive state. *Theoretical Criminology*, (May), 2025. <https://doi.org/10.1177/13624806241310444>
- Hao, Y., Wang, X., Chang, L., Li, L., & Zhang, M. (2025). A Dynamic Social Network Graph Anonymity Scheme with Community Structure Protection. *Computers, Materials and Continua*, 82(2), 3131–3159. <https://doi.org/10.32604/cmc.2024.059201>
- Kinasih, W., & Pramono, J. (2018). Optimalisasi peran satlinmas di kelurahan gilingan kecamatan banjarsari kota surakarta. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1922>
- Kirk, T., Pendle, N., & Akoi, A. D. (2024). Community self-protection, public authority and the safety of strangers in Bor and Ler, South Sudan. *Global Policy*, (May), 13364. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13364>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

- Nugroho, D. S., & Supardal, S. (2022). Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.262>
- Nurdin, M., & Hartati, N. (2019). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial dan kebijakan*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Nurhayunda, N., & Reviandani, O. (2025). Efektivitas Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) Dalam Mendukung Kesiapsiagaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 606–614. <https://doi.org/10.61579/future.v3i2.420>
- Prabowo Hadi (2022). Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik. PT Remaja Rosdakarya.
- Pramono, J., & Prianggodo, C. A. (2023). Civil Protection Model in Indonesia Through Optimizing Satlinmas. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7(2), 429–443. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v7i2.50326>
- Pramono, J., & Suranto, J. (2022). Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Abdimas Serawai*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36085/jams.v2i1.3007>
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*. Alfabeta Bandung, 148.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Winarko, A. D., & Mursyidah, L. (2024). Empowerment of Satlinmas in Improving Public Order and Security. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3), <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i1.1137>

